

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

**MEMORANDUM**

NOMOR: B3196/PSDKP.1/TU.140/I/2021

Yth. : Sekretaris Ditjen.PSDKP  
Dari : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada  
Hal : Laporan Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada  
Tahun 2020  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Tanggal : 22 Januari 2021

---

Sesuai ketentuan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: KEP/23/MEN/2002 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Program/Proyek Pembangunan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Pung Nugroho Saksono

Tembusan :  
Koordinator Kelompok Lingkup Direktorat POA



# LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA  
TAHUN 2020



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PUNG NUGROHO SAKSONO**  
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan IV 2020 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sampai dengan Triwulan IV 2020.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2020.

Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada triwulan IV 2020 telah diupayakan melalui pelaksanaan program Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : <sup>(1)</sup> Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; <sup>(2)</sup> Operasional Pusat Pengendalian; <sup>(3)</sup> Penyediaan Logistik dan Pengawakan Kapal Pengawas; dan <sup>(4)</sup> Operasional Armada dan Perawatan.

Penyusunan LKj Triwulan IV 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawasan SDKP. Semoga di masa mendatang kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melaksanakan pengawasan SDKP dapat menjadi lebih baik dan terus ditingkatkan.

**Jakarta, 21 Januari 2021**

Direktur Pemantauan dan Operasi  
Armada

**Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM**

# Tim Penyusun

## **Penanggungjawab**

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

## **Koordinator Pelaporan Laporan Kinerja Lingkup Direktorat POA Triwulan IV 2020**

1. Koordinator Kelompok Infrastruktur;
2. Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha Direktorat POA;
3. Ikrom Bungsu, S.Pi

## **Kontributor Penyusunan LKj Lingkup Direktorat POA Tahun 2020**

1. Putu Pinandytha Bagus Rinata, S.Kel
2. Edwin Haryanto, S.tr.Pi
3. Bilmantasya Al Fattha, ST
4. Rifki Rezvani, S.T

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Daftar Isi  
Ringkasan Eksekutif

## BAB 1

### PENDAHULUAN

---

Latar Belakang	13
Maksud dan Tujuan	13
Tantangan Dan Isu-Isu Strategis	14
Tugas dan Fungsi	17
Sistematika Penyajian	18

## BAB 2

### PERENCANAAN KINERJA

---

Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024	20
Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024	20
Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada	22
Perjanjian Kinerja 2020	22
Pengukuran Capaian Kinerja	26

## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

---

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan IV 2020	28
Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja	31
Sasaran Kegiatan 1	31
Sasaran Kegiatan 2	33
Sasaran Kegiatan 3	40
Sasaran Kegiatan 4	41
Sasaran Kegiatan 5	50
Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya	60

## BAB 4

### PENUTUP

Kesimpulan & Saran	64
Rekomendasi	65

# DAFTAR TABEL

## Halaman

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan IV 2020.....	8
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020 .....	23
Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020.....	26
Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2020 .....	28
Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Triwulan IV 2020.....	32
Tabel 6. Target dan realisasi IKU-2 periode Triwulan IV 2020.....	32
Tabel 7. Daftar Tindak Lanjut Informasi Masyarakat Oleh UPT PSDKP .....	33
Tabel 8. Target dan realisasi IKU-3 periode Triwulan IV 2020.....	34
Tabel 9. Daftar Armada Kapal Pengawas Ditjen PSDKP Tahun 2020.....	35
Tabel 10. Target dan realisasi IKU-4 periode Triwulan IV 2020.....	35
Tabel 11. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli periode Triwulan IV 2020.....	35
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan IV 2020 .....	39
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan IV 2020 .....	39
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan IV 2020 .....	40
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan IV 2020 .....	41
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan IV 2020 .....	42
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan IV 2020 .....	43
Tabel 18. Target dan realisasi hari operasi Kapal Pengawas Perikanan 2015-2020 .....	43
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan IV 2020 .....	42
Tabel 20. Hari operasi Speed Boat Periode Triwulan IV 2020 .....	44
Tabel 21. Capaian hari operasi speedboat pengawas 2019-2020 .....	44
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-12 Periode Triwulan IV 2020 .....	45
Tabel 23. Rincian pelaksanaan operasi udara sd Desember 2020 .....	45
Tabel 24. Target dan realisasi IKU-13 periode Triwulan IV 2020.....	49
Tabel 25. Target dan realisasi IKU-14 periode Triwulan IV 2020.....	51
Tabel 26. Target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan IV 2020.....	51
Tabel 27. Rincian target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan IV 2020.....	52
Tabel 28. Target dan realisasi IKU-17 periode Triwulan IV 2020.....	54
Tabel 29. Target dan realisasi IK-18 periode Triwulan IV 2020 .....	58
Tabel 30. Target dan realisasi IK-19 periode Triwulan IV 2020 .....	53
Tabel 31. Target dan realisasi IK-20 periode Triwulan IV 2020 .....	59
Tabel 32. Target dan realisasi IKU-21 periode Triwulan IV 2020.....	60
Tabel 33. Target dan realisasi IKU-22 periode Triwulan IV 2020.....	55
Tabel 34. Target dan realisasi IKU-23 periode Triwulan IV 2020.....	56
Tabel 35. Target dan realisasi IKU-24 periode Triwulan IV 2020.....	56
Tabel 36. Target dan realisasi IKU-25 periode Triwulan IV 2020.....	57
Tabel 37. Target dan realisasi IKU-26 periode Triwulan IV 2020.....	57
Tabel 38. Target dan realisasi IKU-27 periode Triwulan IV 2020.....	58
Tabel 39. Target dan realisasi IKU-28 periode Triwulan IV 2020.....	59
Tabel 40. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 31 Desember 2020 .....	60
Tabel 41. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA 2018-2020 .....	61

# DAFTAR GAMBAR

## Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	17
Gambar 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV 2020	59

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV 2020. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK)Peta Strategis Direktorat POA tahun 2020 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud, Direktorat POA telah menetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja (IK). Target pencapaian IKU/IK periode Triwulan IV 2020 sebanyak 28 IKU/IK, sebanyak 26 IKU/IK telah memenuhi target dan 2 IK yang belum memenuhi target. Capaian kinerja Direktorat POA untuk Triwulan IV 2020 mencapai 107.50% meningkat dari triwulan tahun IV 2019 sebesar 103.79%.

Berbagai kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan anggaran Triwulan IV 2020 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan SDKP. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya tiga target IK yaitu IK: tidak tercapai, “Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi” dari target **120%** tidak tercapai, “Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Dit, POA” dari target **90%** tidak tercapai hal ini menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat POA pada periode triwulan IV 2020.

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan Triwulan IV 2020 telah melaksanakan 11 output kegiatan dalam APBN Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2020. Pagu Direktorat POA yang semula sebesar Rp270.134.837.000 (dua ratus tujuh puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan penyesuaian anggaran dikarenakan Pandemi Covid-19 anggaran Satker Dit. POA menjadi Rp. 193.273.811.000-, (seratus sembilan puluh tiga milyar dua rauts tujuh puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan IV 2020 sebesar Rp 193,273,811,000-, atau sekitar **97,78%** dari Pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dari periode Triwulan IV 2020 (**Rp.188.974.856.860**), kenaikan realisasi anggaran ini turut dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang tetap dilaksanakan ditengah pandemi covid-19

Direktorat POA telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan IV 2020 berdasarkan prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Berikut disajikan tabel realisasi dan capaian IKU dan IK Direktorat POA periode Triwulan IV 2020 menurut tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan IV 2020

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas	90	100	111.11
		2	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas	70	100	142.86
2	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	3	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	51	59.72	117.10
		4	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli	53	69.34	130.83
		5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	1.6	2.95	184.38
		6	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP	80	100	125.00
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7	Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi	120	110	91.67
4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	8	Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas	86.72	88.24	101.75
		9	Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	86.72	86.72	100.00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	
		10	Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas	105	109	103.81
		11	Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	20	22	110.00
		12	Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli	123	131	106.50
		13	Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan	100	100	100.00
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	14	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan akuntabilitas lingkup Direktorat POA aspek pemenuhan	0.55	1	181.82
		15	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Direktorat POA aspek pemenuhan	0.55	0.89	161.82
		16	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan akuntabilitas lingkup Direktorat POA aspek reform	0.83	0.86	103.61
		17	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Direktorat POA aspek reform	0.83	0.87	104.82
		18	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA	7	7	100.00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	
		19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	72	68.85	95.63
		20	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	75	85	113.33
		21	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA	80	100	125.00
		22	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA	90	89.91	99.90
		23	Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat POA	1	1	100.00
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter	80	88.4	110.50
		25	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA	1	1	100.00
		26	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	60	75.92	126.53
		27	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	82	90.37	110.21

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	
		28	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA	88	91.05	103.47
<b>Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA</b>					<b>107.51%</b>	

# BAB 1

---

## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja  
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada  
Direktorat Jenderal PSDKP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Triwulan IV 2020

## A. LATAR BELAKANG

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus merupakan salah satu program/kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan SDKP bertujuan untuk menjamin dimanfaatkannya SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga kelestarian dan keberlanjutan tetap terpelihara untuk kepentingan ekonomi nasional.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Direktorat POA berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Peran tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA triwulan IV 2020 yang menginformasikan capaian kinerja selama periode triwulan IV 2020.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat POA Triwulan IV 2020 yaitu: Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh *stakeholder*. Kedua, laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## C. TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2020

### C.1. TANTANGAN PENGAWASAN SDKP

Indonesia memiliki luas total sebesar 7.81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan dan 2.55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ditambah dengan adanya perbatasan laut dengan 10 negara tetangga antara lain: India, Thailand, Republik Palau, Timor Leste, Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Papua Nugini, dan Vietnam. Hal ini menjadi tantang tersendiri. Mengingat potensi terjadinya klaim wilayah, masuknya nelayan dari negara lain di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Dibutuhkan kesiapan armada pengawasan khususnya Kapal Pengawas Perikanan yang memiliki daya jelajah sampai ZEE, kesiapan personil, penerapan teknologi terkini, dan kolaborasi antar instansi maupun antar negara.

Selain itu, tantangan lainnya adalah, masih ditemukannya pelaku IUU *fishing* yang kembali tertangkap oleh petugas, hal ini mengindikasikan belum maksimalnya efek jera terhadap para pelaku IUU *fishing*. Disamping itu berkembangnya modus operandi pelaku IUU *fishing* serta implementasi dari kebijakan pimpinan terkait pelarangan alat tangkap tertentu.

### C.2. ISU-ISU STRATEGIS

#### **PRAKTIK ILLEGAL FISHING TETAP MARAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

Situasi pandemic Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia nyatanya tidak mengurangi praktik *illegal fishing* khususnya yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA). Eskalasi ketegangan di kawasan Laut China Selatan juga turut meningkat. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah Indonesia harus tetap waspada dan mengoptimalkan unsur armada pengawasan dalam rangka mengawasi perairan Indonesia dari berbagai potensi tindakan *illegal fishing*. Keamanan Awak Kapal Pengawas menjadi hal utama, khususnya dalam hal perlindungan diri, sehubungan dengan hal tersebut Direktorat POA telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 untuk AKP seperti pengadaan masker, handsanitizer, thermo gun, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Hal ini semata-mata untuk menjaga personil tetap sehat dalam rangka melakukan pengawasan SDKP.

#### **PERAN POKMASWAS**

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

Peran POKMASWAS sangat besar dalam mengungkap praktik-praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh POKMASWAS kepada aparat penegak hukum sangat bermanfaat untuk tindakan hukum terhadap para pelaku yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dengan adanya informasi dari masyarakat mempermudah mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan / aktifitas pengelolaan SDKP yang mengabaikan prinsip-

prinsip sumber daya lestari, karena sebagian masyarakat masih memilih jalan pintas misalnya dengan menggunakan bom ikan, obat bius dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Direktorat POA dalam rangka memfasilitasi keberadaan POKMASWAS ini telah mengalokasikan anggaran ke daerah melalui alokasi dana DEKONSENTRASI, tahun 2020 sebesar Rp2,323,075,000 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi pembinaan terhadap POKMASWAS. Selain itu, dalam rangka memberi apresiasi dan memupuk semangat masyarakat untuk secara sukarela melakukan pengawasan SDKP di lapangan, Ditjen PSDKP melalui Direktorat POA melakukan penilaian dan menetapkan POKMASWAS teladan tingkat nasional dan diberi penghargaan dan apresiasi.

#### **KAJIAN LAIK OPERASI ARMADA KAPAL PENGAWAS**

Keberhasilan terhadap pengawasan SDKP tidak luput dari armada kapal pengawas yang laik operasi. Kajian dilakukan untuk evaluasi kelaikan kapal pengawas yang berusia lebih dari 10 tahun, khususnya material *fiberglass* dalam rangka menjaga keselamatan Awak Kapal Pengawas (AKP) dan mengetahui kesiapan kapal bertugas di laut. Berdasarkan hasil kajian dengan menilai beberapa aspek (keselamatan, teknis, dan operasional). Dari 34 unit kapal pengawas perikanan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP, 6 unit kapal pengawas dinilai tidak laik operasi di laut yaitu: (1) KP. Takalamungan, (2) KP. Padaido, (3) KP. Todak 01, (4) KP. Todak 02, (5) KP. Barracuda 01, dan (6) KP. Barracuda 02. Dari 6 unit kapal pengawas tersebut, bermaterial *fiberglass*.

#### **HIBAH KAPAL PENGAWAS DARI PEMERINTAH JEPANG PERKUAT ARMADA PENGAWASAN**

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, Pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal sebanyak 2 unit yaitu "Hakurei Maru" dan "Shirahagi Maru". Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat armada pengawasan SDKP Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kemitraan yang cukup strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam pengelolaan SDKP secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan rencana hibah tersebut, Pemerintah Indonesia melalui tim Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu: Ditjen PSDKP, BPPT dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tanggal 26 s.d 29 Nopember 2019 di Jepang. Untuk memastikan kapal dalam kondisi baik, telah dilakukan survey

Direncanakan pengiriman ke Indonesia pada tahun 2022, karena pada tahun 2020 masih periode akhir penugasan kapal tersebut di Jepang. Agenda perbaikan menyeluruh akan dilakukan pada tahun 2021, sehingga baru tahun 2022 kapal tersebut dikirim ke Indonesia.

Berdasarkan hasil kunjungan dan pengecekan langsung oleh Tim, kedua kapal tersebut secara fisik masih terawat dengan baik dan laik laut. Namun demikian, Tim Indonesia merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: meminta Pemerintah Jepang untuk memastikan kapal benar-benar dalam kondisi laik operasi pada saat proses hibah, meminta manual book kapal dan mesin disiapkan dalam berbahasa Inggris dan meminta mesin diesel

yang terpasang di kapal dapat bekerja dengan bahan bakar bio diesel sesuai kebijakan Pemerintah Indonesia.

### **SINERGITAS DALAM MELAKSANAKAN OPERASI BERSAMA**

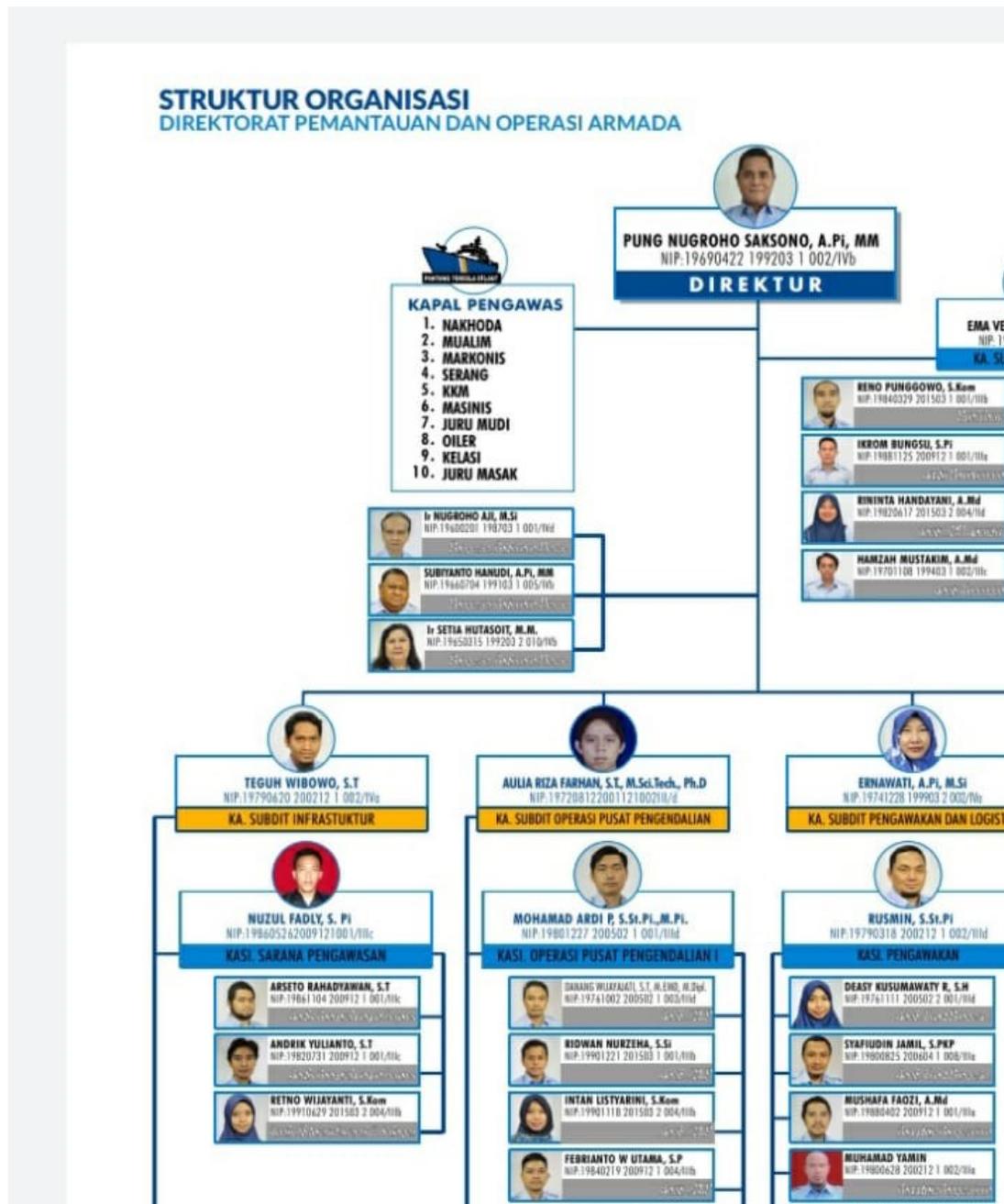
Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi dilaut seperti, *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking*/Penyelundupan manusia dan boat people (manusia perahu ), terorisme dan bajak laut.

Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Adanya beberapa Lembaga penegak hukum di laut tersebut semestinya menjadi kekuatan tersendiri bila sinergi. Luasnya perairan yang dimiliki Indonesia mengharuskan operasi Bersama dan terkoordinasi antar Lembaga penegak hukum di laut.

Berkaca dari permasalahan Natuna, sebagian pihak menganggap bahwa hal itu terjadi karena sering kosongnya perairan Natuna dari pengawasan. Bila hanya dibebankan kepada Direktorat Jenderal PSDKP, tentulah berat mengingat masih terbatasnya armada kapal pengawas perikanan yang dimiliki.

## D. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

### 1. Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

2. Fungsi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
  - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
  - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2019 serta sistematika penyajian laporan.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2015-2019 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2019.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2019.

### **Bab IV Penutup**

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2019 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja  
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada  
Direktorat Jenderal PSDKP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat POA, Ditjen. PSDKP berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: <sup>(1)</sup> Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019; <sup>(3)</sup> Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan <sup>(4)</sup> Perjanjian Kinerja Direktorat POA tahun 2019.

## **A. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024**

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024**

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
  - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
  - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
  - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
  - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
  - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
  - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
  - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
  - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
  - a. Operasi bersama pengawasan di laut
  - b. Pertukaran data
  - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
  - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
  - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
  - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
  - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
  - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan

5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
  - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
  - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
  - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
  - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
  - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

### **C. KEGIATAN PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017, Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada terdiri dari 4 (empat) keluaran, yaitu:

- a. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP;
- b. Operasional Pusat Pengendalian;
- c. Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan
- d. Operasional Armada dan Perawatan.

Dalam mendukung kegiatan pemantauan dan operasi armada didukung oleh beberapa output kegiatan sebagai berikut:

1. Operasional Kapal Pengawas;
2. Operasional Pesawat Patroli;
3. Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi;
4. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi;
5. Supervisi Operasional Speedboat;
6. Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi;
7. Kapal Pengawas yang Dibangun;
8. Speedboat Pengawas yang Dibangun;
9. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
10. Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun;
11. Layanan Perkantoran.

### **D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT POA 2020**

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang berisi tekad dan janji yang akan dicapai antara Pimpinan

unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja tahun 2020 terdiri atas 5 Sasaran Kegiatan selama periode tahun dimana pengukurannya melalui instrument realisasi Indikator Kinerja, berdasarkan target kinerja yang akan dicapai.

**Tabel 2.** Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas	%	90
		2	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas	%	70
2	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	3	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	%	50
		4	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli	%	52.4
		5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	%	1.6
		6	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP	Indeks	80
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7	Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi	Unit	120
4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	8	Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas	Indeks	86.72
		9	Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Indeks	86.72

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		10	Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas	Hari	105
		11	Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Hari	20
		12	Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli	Hari	123
		13	Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan	%	100
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	14	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan akuntabilitas lingkup Direktorat POA aspek pemenuhan	Nilai	0.55
		15	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Direktorat POA aspek pemenuhan	Nilai	0.55
		16	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan akuntabilitas lingkup Direktorat POA aspek reform	Nilai	0.83
		17	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Direktorat POA aspek reform	Nilai	0.83
		18	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA	Dokumen	7

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
		19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	Indeks	72
		20	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	Nilai	75
		21	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA	%	80
		22	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA	Nilai	90
		23	Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat POA	Inovasi	1
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter	%	80
		25	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA	Inovasi	1
		26	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	60
		27	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	%	82
		28	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA	Indeks	88

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan tersebut, beberapa output kegiatan dan alokasi anggaran Direktorat POA tahun 2020 setelah penyesuaian dikarenakan Pandemi Covid-19 ditabulasikan sebagai berikut :

**Tabel 3.** Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Operasional Kapal Pengawas	100,268,284,000
2	Operasional Pesawat Patroli	27,877,009,000
3	Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	8,716,587,000
4	Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi	46,339,262,000
5	Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	5,584,159,000
6	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	194,400,000
7	Kapal Pengawas yang Dibangun	2,466,106,000
8	Speedboat Pengawas yang dibangun	153,685,000
9	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	897,799,000
10	Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	518,760,000
11	Layanan Perkantoran	257,760,000
Anggaran Direktorat POA 2020		<b>193,273,811,000</b>

## E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis teknologi informasi.

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja  
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada  
Direktorat Jenderal PSDKP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Tahun 2020

## A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV 2020

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA Triwulan IV 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa **nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 107.51%** dengan indikator NPSS berwarna HIJAU . Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Dari tabel perbandingan di atas terlihat kenaikan capaian perspektif *internal process* dan *learning and growth*. *Summary* dari capaian tiap perspektif ditampilkan pada infografis berikut ini:

**Tabel 4.** Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Triwulan IV 2020

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas	90	100	111.11
		2	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas	70	100	142.86
2	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	3	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	51	59.72	117.10
		4	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli	53	69.34	130.83
		5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	1.6	2.95	184.38
		6	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP	80	100	125.00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7	Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi	120	110	91.67
4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	8	Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas	86.72	88.24	101.75
		9	Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	86.72	86.72	100.00
		10	Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas	105	109	103.81
		11	Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	20	22	110.00
		12	Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli	123	131	106.50
		13	Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan	100	100	100.00
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	14	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan akuntabilitas lingkup Direktorat POA aspek pemenuhan	0.55	1	181.82
		15	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Direktorat POA aspek pemenuhan	0.55	0.89	161.82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	
		16	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan akuntabilitas lingkup Direktorat POA aspek reform	0.83	0.86	103.61
		17	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Direktorat POA aspek reform	0.83	0.87	104.82
		18	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA	7	7	100.00
		19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	72	68.85	95.63
		20	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	75	85	113.33
		21	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA	80	100	125.00
		22	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA	90	89.91	99.90
		23	Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat POA	1	1	100.00
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter	80	88.4	110.50
		25	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA	1	1	100.00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	
		26	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	60	75.92	126.53
		27	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	82	90.37	110.21
		28	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA	88	91.05	103.47

## B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

### SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat” diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas, dan (2) Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas (%).

#### 1

#### TINGKAT KEAKTIFAN PROVINSI DALAM PEMBINAAN POKMASWAS

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan Provinsi dalam melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berada di bawah kendali pembinaannya. Salah satu tools yang digunakan adalah Laporan Pembinaan Pokmaswas dari DKP Provinsi yang dilengkapi dengan “form keaktifan POKMASWAS” yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke setiap Provinsi terkait.

DKP Provinsi wajib melakukan pembinaan terhadap POKMASWAS. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada “Form

Keaktifan POKMASWAS". Pembinaan terhadap POKMASWAS dapat dilakukan menyesuaikan rencana aksi masing-masing Provinsi.

**Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas	90	100	111.11

Pada tahun 2020, capaian IKU "Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas" ditargetkan sebesar **90,00%**. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2020 sebesar 100 dengan realisasi sebesar **111.11%**. Hasil tersebut didapatkan dari sebanyak 34 provinsi telah mengirimkan laporan pembinaan Pokmaswas pada triwulan IV.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp.897.799.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.875.669.000,- atau 97,54%.

## 2

### PERSENTASE TINDAK LANJUT INFORMASI POKMASWAS

Indikator kinerja "Persentase Tindak lanjut Informasi POKMASWAS IKU ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut informasi POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT/SATWAS Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Informasi yang disajikan dapat berupa :

1. Informasi melalui SMS Gateway yang akan diteruskan ke UPT/SATWAS;
2. Informasi langsung yang diberikan kepada UPT/SATWAS.

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh UPT/SATWAS PSDKP dapat berupa:

1. Pelaksanaan patroli;
2. Melakukan pengumpulan data (pemanggilan, melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan, dan lain-lain).

**Tabel 6. Target dan realisasi IKU-2 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Persentase Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS	70	100	142,86

Hingga Triwulan IV 2020 untuk Indikator Kinerja "Persentase Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS" telah tercapai sebesar **142,86%**. Capaian tersebut berasal dari tindak lanjut informasi Pokmaswas yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Jakarta, Stasiun PSDKP Belawan, Pangkalan PSDKP Benoa, dan Stasiun PSDKP Kupang. Rincian laporan dan tindak lanjut informasi Pokmaswas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 7. Daftar Tindak Lanjut Informasi Masyarakat oleh UPT PSDKP**

No	UPT	Laporan Pokmaswas	Isi Laporan	Proses Tindak Lanjut
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	1	1. Adanya penambangan pasir laut di wilayah area nelayan lampung, Kab. Tulang Bawang, mohon segera di tindak	1. Melaksanakan peninjauan lapangan namun tidak ditemukan aktivitas penambangan pasir di lokasi yang di laporkan;
2	Stasiun PSDKP Belawan	1	1. Indikasi adanya illegal fishing di selat malaka	1. Melaksanakan patroli menggunakan KP HIU 12 dan mendapatkan 3 (tiga) kapal berbendera malaysia di selat malaka
3	Pangkalan PSDKP Benoa	4	1. Adanya kapal kandas di zona budidaya rumput laut	1. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dengan cara mengikat kapal yang sudah kandas;
			2. penangkapan hiu martil oleh nelayan	2. memberikan pengertian tentang aturan aturan terkait
			3. Pengaduan kapal purse seine kalimantan yang beroperasi di sumenep	3. melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait untuk melaksanakan patroli
			4. Pengaduan pengerukan pasir PT. Tekad Andhika Dharma	4. dilaksanakan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dengan Dit. PPSDK untuk musyawarah mufakat
4	Stasiun PSDKP Kupang	2	1. Dipersulit untuk mendapatkan rekomendasi menjadi penangkap benih lobster 2. terdapat informasi tentang kegiatan illegal fishing di Australia	1. Melakukan koordinasi dengan DKP Provinsi NTT 2. memberikan surat peringatan kepada kapal indonesia yang melakukan kegiatan di Australia.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 2 sebesar Rp.897.799.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.875.669.000,- atau 97,54%.

## SASARAN KEGIATAN 2

### Terselenggaranya Pemantauan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (2) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli, (3) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dan Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP.

Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas” bertujuan untuk mengukur luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan armada kapal pengawas (matra laut). Dengan adanya perhitungan luasan cakupan yang di awasi ini, mengkonfirmasi kehadiran Negara dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya kedaulatan pengelolaan sumber daya ikan di WPP-NRI. Rincian capaian cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas ditabulasikan pada tabel berikut:

**Tabel 8. Target dan realisasi IKU-3 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	52.38	51	59.72	117.10

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas” periode Triwulan IV 2020 adalah sebesar **59.72%** dari target sebesar **51.00%** dengan persentase capaian sebesar **117,10%**, dan luasan WPPNRI yang diawasi sebesar sebesar **1.208.488 NM<sup>2</sup>**. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

Kontribusi cakupan diberikan oleh 28 unit armada kapal pengawas perikanan sebagai berikut:

**Tabel 9. Daftar armada kapal pengawas Ditjen PSDKP Tahun 2020**

No	Nama Kapal	No	Nama Kapal	No	Nama Kapal
1	KP Orca 01	11	KP Hiu Macan 04	21	KP Hiu 08
2	KP Orca 02	12	KP Hiu Macan 05	22	KP Hiu 09
3	KP Orca 03	13	KP Hiu Macan 06	23	KP Hiu 10
4	KP Orca 04	14	KP Hiu 01	24	KP Hiu 11
5	KP Hiu Macan Tutul 01	15	KP Hiu 02	25	KP Hiu 12
6	KP Hiu Macan Tutul 02	16	KP Hiu 03	26	KP Hiu 13
7	KP Paus 01	17	KP Hiu 04	27	KP Hiu 14
8	KP Akar Bahar 01	18	KP Hiu 05	28	KP Hiu 15
9	KP Hiu Macan 01	19	KP Hiu 06		
10	KP Hiu Macan 03	20	KP Hiu 07		

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp.100.268.284.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.98.080.985.804,- atau 97,82%.

Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan Pesawat Patroli” bertujuan untuk mengukur luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan armada pesawat patrol udara (matra udara). Dengan adanya perhitungan luasan cakupan yang di awasi ini, mengkonfirmasi kehadiran Negara dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya kedaulatan pengelolaan sumber daya ikan di WPP-NRI. Rincian capaian cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan pesawat patrol udara ditabulasikan pada tabel berikut:

**Tabel 10. Target dan Realisasi IKU-4 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli	65	53	69.34	130.83%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli udara” periode Triwulan IV 2020 adalah sebesar **53%** dari target sebesar **69.34%** dengan persentase capaian melampaui target yaitu sebesar **130,83%**, dan luasan WPPNRI yang diawasi sebesar sebesar **1,337,313 NM2**. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

Selama periode operasi Triwulan IV 2020 telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) periode operasi dengan lokasi pangkalan operasi antara lain: Mando, Jakarta, NTT, Palembang, Medan, Natuna, dan Sorong. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 96 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain : "Beechcraft King Air B200GT Beechcraft Hawker 900XP", Beechcraft King Air B200GT, Seneca IV PA-34-220T, Beechcraft King Air B200GT.

Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas di laut, antara lain :

1. Periode X: Operasi Mandiri
2. Periode XA: Operasi Mandiri
3. Periode XI: Operasi Mandiri
4. Periode XIA: HIU Macan Tutul 02
5. Periode XIB: Operasi Mandiri
6. Periode XII: Operasi Mandiri

**Tabel 11. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode IV 2020**

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM <sup>2</sup> )	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I	1 dan 7-9 Januari 2020	4	Natuna	WPPNRI 711	46.732,8	KP ORCA 01, KP ORCA 02, KP HMT 02	• Pemantauan aktivitas KIA asal Vietnam

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM <sup>2</sup> )	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
II-A	10 Februari 2020	1	Jakarta	WPPNRI 712	3.523,2	-	Operasi Mandiri
II	12 - 28 Februari 2020	13	Manado dan Ternate	WPPNRI 716, 715, 713	158.592	KP Hiu 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan aktivitas Pumpboat KIA Filipina</li> <li>• Penerusan informasi ke KP terintegrasi.</li> </ul>
III	16 - 26 Maret 2020	10	Merauke, Biak, Sorong	WPPNRI 716, 717, 718	128.795,2	KP Hiu 05, KP HIU 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan KKPNN TWP Padaido, TN Cendrawasih, Waigeo;</li> <li>• Pemantauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil PMA</li> <li>• Pemantauan aktivitas KIA dan KII</li> </ul>
IV	6 - 7 April 2020	2	Batam	WPPNRI 711	30.708,8	KP. Orca 02 KP. Orca 03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerusan informasi ke Kapal Pengawas</li> <li>• Pemantauan terhadap KIA Vietnam</li> </ul>
IV-A	13 - 25 April 2020	9	Batam II dan Medan	WPPNRI 711, 712, 571, 572	75.953,6	KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. HMT 02, KP. Hiu 08 KP. Hiu 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerusan informasi ke Kapal Pengawas</li> <li>• Pemantauan terhadap KIA di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara</li> <li>• Pemantauan terhadap KII Mini Otter Trawl di Perairan Lampung Timur dan Tanjung Balai Asahan</li> </ul>
IV-B	22-23 April 2020 dan 28 - 30 April 2020	5	Batam III	WPPNRI 711	56.553,6	KP. ORCA 02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Misi SAR dengan KP. ORCA 02</li> <li>• Pemantauan aktivitas KIA dan KII</li> </ul>
V	7 - 19 Mei 2020	11	Manado II dan Ternate	WPPNRI 712, 715, 716, 714, 713	89.465,6	KP Orca 01, KP Orca 04, KP Hiu 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adhoc 1 KIA Philipina</li> <li>• Pemantauan aktivitas kapal cantrang di Laut Jawa dan operasional FAD di di Teluk</li> </ul>

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM <sup>2</sup> )	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
							Tomini dan Laut Sulawesi
VI	8 - 12 Juni 2020 dan 15 - 18 Juni 2020	9	Manado III dan Batam III	WPPNRI 716, 711	118.201,6	KP Orca 02 KP Hiu 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan aktivitas KIA di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara</li> </ul>
VI-A	22 Juni - 6 Juli 2020	10	Surabaya dan Nusa Tenggara	WPPNRI 573, 713	72.025,6	Satwas PSDKP Lombok dan Stasiun PSDKP Kupang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan aktivitas KII</li> <li>• Pemantauan operasional jaring penangkap benih lobster di perairan Lombok</li> </ul>
VII	10 Juli dan 21 Juli 2020	2	Banyuwangi dan Pontianak	WPPNRI 712 dan 711	13.804,8	-	Operasi Mandiri
IX	2 September dan 7 - 28 September 2020	14	Natuna III dan Medan II	WPPNRI 712, 711, dan 571	82.688	KP ORCA 02, KP PAUS 01, KP HIU 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan aktivitas KIA Malaysia dan Vietnam</li> <li>• Adhoc 1 KIA Malaysia oleh KP Hiu 12</li> </ul>
IXA	24 - 30 September 2020	6	Batam V	WPPNRI 711	79.278,4	KP ORCA 02, KP PAUS 01, KP HIU 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan aktivitas KIA Vietnam</li> <li>• Operasi SAR Kecelakaan Kapal Nelayan KM. Laura di Perairan Anambas</li> </ul>
X	5 - 22 Oktober 2020	15	Manado IV	WPPNRI 716, 715, 714, 573, dan 713	180.475,2	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validasi Kepatuhan terhadap SPKP 3 Kapal Purse Seine dan 1 Kapal Longline</li> </ul>
XA	19-20 dan 21-23 Oktober 2020	5	Jakarta dan Nusa Tenggara II	WPPNRI 573	79.299,2	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan KKPNI Laut Sawu dari Operasional Fishing Agregate Devices (FAD)</li> </ul>
XI	11 November 2020	1	Palembang	WPPNRI 712	7.696	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Mini Otter Trawl di Perairan Lampung Timur</li> </ul>

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM <sup>2</sup> )	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
XI-A	5 dan 12-17 November 2020	7	Medan III dan Natuna IV	WPPNRI 571 dan 711	100.534,4	KP HMT 02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan aktivitas KIA Malaysia dan Vietnam</li> </ul>
XI-B	12 November 2020	1	Sorong	WPPNRI 717	24.624	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan aktivitas KIA di Samudera Pasifik</li> </ul>
XII	17 – 23 Desember 2020	5	Natuna V	WPPNRI 711	52588,32	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan aktivitas KIA di bagian Laut Utara Natuna Utara sebanyak 25 Kapal</li> <li>Validasi 3 Kapal Purse Seine dan 1 Kapal Cast Net untuk Kapal &gt; 30GT</li> </ul>
<b>Total Hari Operasi</b>		<b>131</b>	<b>Total Coverage Area (NM<sup>2</sup>)</b>		<b>1.337.314</b>		

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp.27.877.009.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.27.852.238.089,- atau 99,91%.

## 5

### PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU MENGGUNAKAN SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT

Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan *Speedboat Pengawas*” bertujuan untuk mengukur luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan armada speedboat pengawas (bagian dari matra laut). Dengan adanya perhitungan luasan cakupan yang di awasi ini, mengkonfirmasi kehadiran Negara dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya kedaulatan pengelolaan sumber daya ikan di WPP-NRI menggunakan armada Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang tersebar di seluruh Indonesia baik yang dimiliki oleh UPT Ditjen PSDKP maupun Satker DKP Provinsi.

Rincian capaian cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan speedboat pengawas ditabulasikan pada tabel berikut:

**Tabel 12.** Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	-	1,6	2,95	184,38%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat” periode Triwulan IV 2020 adalah sebesar **2,95%** dari target sebesar **1,6%** dengan persentase capaian sebesar **184,38%**, dan luasan WPPNRI yang diawasi sebesar sebesar **56.872 NM2**. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah armada Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang tercatat pada database Direktorat POA sebanyak 128 unit.
2. Dari jumlah armada tersebut, sebanyak 9 unit Speedboat terpantau belum melaksanakan operasi, hal tersebut diperoleh informasi dari laporan yang masuk, dimana jumlah laporan hasil operasi Triwulan IV 2020 hanya 119 unit speedboat yang sudah beroperasi. Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Direktorat POA, bahwa sebagian speedboat dalam proses perbaikan, dan Sebagian yang lain akan beroperasi pada Triwulan IV, dikarenakan kendala Covid-19 dimana terdapat larangan perjalanan dinas di sejumlah Provinsi oleh Gubernur setempat.
3. Total jam operasi sejumlah **14217,97** jam dengan capaian jumlah rata-rata hari operasi sebanyak 22,4 hari.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp.194.400.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.186.960.893,- atau 97,54%.

## 6

### INDEKS PEMENUHAN DATA DAN ANALISIS HASIL PEMANTAUAN UNTUK OPERASI PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja “Indeks Pemenuhan Data dan Analisa Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP merupakan pengukuran pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan yang disiapkan oleh Direktorat POA kepada user pengguna hasil analisis. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS).

Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA periode Triwulan IV 2020 ditabulasikan pada tabel berikut:

**Tabel 13. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP	-	80	100	125,00%

Indikator ini merupakan Indikator baru untuk tahun 2020, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian melampaui target yang ditetapkan, target untuk Triwulan IV 2020 sebesar 80% dengan capaian 100% dengan persentase capaian sebesar

125.00%. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa melakukan pemenuhan kebutuhan data dan analisis hasil pemantauan yang digunakan untuk kebutuhan operasi pengawasan SDKP.

Pemenuhan analisis data pada periode Triwulan IV 2020 meliputi: Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan, Kebutuhan Operasi Kapal Pengawas, Kebutuhan Operasi Pesawat Patroli, Analisis Pergerakan Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Pemantauan Kapal Perikanan di 10 (sepuluh) Wilayah Konservasi Nasional

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 6 ini sebesar Rp.5.584.159.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.5.487.338.245,- atau 98,27%.

### SASARAN KEGIATAN 3

#### Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi.

7

#### JUMLAH ARAMDA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG SIAP OPERASI

Indikator Kinerja “Jumlah Kapal Pengawas yang Dibangun” IKU ini bertujuan untuk mengukur Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi pada tahun 2020.

Hingga Triwulan IV 2020 terdapat 110 kapal yang siap operasi dari target 120 kapal, hal tersebut dikarenakan terdapat 3 (tiga) kapal pusat yang tidak siap dikarenakan adanya kerusakan dan 7 (tujuh) kapal UPT yang memang dalam kondisi tidak bisa dilakukan perbaikan pada Tahun 2020. Secara rinci capaian sebagai berikut:

**Tabel 14.** Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Jumlah Speedboat Pengawas yang Dibangun	-	120	110	91,67

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp.46.339.262.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.44.729.570.383,- atau 96,53%.

## SASARAN KEGIATAN 4

### Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas (2) Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, (3) Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas, (4) Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, (5) Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli, (6) Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp.100.268.284.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.98.080.985.804,- atau 97,82%.

## 8

### INDEKS KINERJA OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

**Tabel 15.** Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas	-	86,72	88,24	101,75

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2020 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2019. Hingga Triwulan IV 2020 indeks kinerja operasional kapal pengawas dari target **86,72%** terealisasi sebesar **88,24%** atau dengan capaian **101,25%**.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini sebesar Rp.100.268.284.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.98.080.985.804,- atau 97,82%.

## 9 INDEKS KINERJA OPERASIONAL SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat terdiri dari 5 (lima) indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
5. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

**Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Indeks Kinerja Operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat	-	86,72	86,72	100

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2020 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2019. Hingga Triwulan IV 2020 untuk IKU ini dari target **86,72%** terlealisasi sebesar **86,72%** atau capaian sebesar **100%**.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 9 ini sebesar Rp.194.400.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.186.960.893,- atau 96,17%.

Indikator “Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Kapal Pengawas” bertujuan untuk mengukur capaian hari operasi yang diperoleh kapal pengawas perikanan Direktorat Jenderal PSDKP. Capaian hari operasi merupakan salah satu tolok ukur dari capaian kinerja Direktorat POA yang sangat dominan. Hal ini karena sebagian besar komponen anggaran pada Direktorat POA diperuntukkan bagi tersedianya logistik kapal pengawas/Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tanpa BBM tentunya Kapal Pengawas Perikanan tidak bisa melaksanakan operasi pengawasan. Besar kecilnya hari operasi sangat berpengaruh terhadap kinerja pengawasan di laut. Semakin banyak alokasi anggaran semakin memberikan kesempatan kepada armada kapal pengawas untuk siap melaksanakan operasi pengawasan SDKP.

Target hari operasi Kapal Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP untuk tahun 2020 sebesar 105 hari operasi dari target selama periode Triwulan IV 2020 (target untuk 28 unit Kapal Pengawas). Target hari operasi tersebut bersifat rata-rata, sehingga target untuk masing-masing kapal tidaklah sama. Hingga akhir Triwulan IV 2020, realisasi rata-rata hari operasi Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP telah tercapai sebesar 109 hari operasi dengan rata-rata jam layar sebesar 10.65 jam per hari. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 capaian Triwulan IV 2020 terlihat lebih tinggi.

Capaian tersebut telah melampaui target yaitu 109 hari. Besarnya capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Perencanaan operasi yang baik sehingga pelaksanaan menjadi lebih terarah;
- Sebagian besar armada kapal pengawas dalam kondisi siap operasi setelah pada akhir tahun 2019 menjalani perbaikan/perawatan maupun *docking*.

**Tabel 17.** Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Kapal Pengawas	88	105 hari	109 hari	103,81

**Tabel 18.** Target dan realisasi hari operasi kapal pengawas perikanan 2015-2020

TAHUN	TARGET HARI OPERASI	CAPAIAN HARI OPERASI	%
2014	66	73	110.61
2015	280	270	96.43
2016	144	138	95.83
2017	136	131	96.32
2018	145	122	84.14
2019	84	88	103.53
2020	105	109	103,81

\*Data sampai dengan Triwulan IV 2020

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 10 ini menggunakan anggaran operasional kapal pengawas sebesar Rp.100.268.284.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.98.080.985.804,- atau 97,82%.

## 11

### JUMLAH RATA-RATA HARI OPERASI SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT

Indikator “Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat” bertujuan untuk mengukur capaian hari operasi yang diperoleh speedboat pengawas Direktorat Jenderal PSDKP. Direktorat POA selaku Pembina teknis di bidang pengoperasian Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup pusat dan UPT senantiasa melakukan kontrol terhadap capaian operasi Kapal Pengawas maupun *Speedboat* Pengawas. Selain melakukan fungsi kontrol dan konsultasi, Direktorat POA juga melakukan supervisi ke lapangan untuk melihat dan memastikan operasi sesuai dengan jadwal serta mengetahui lebih dekat kendala-kendala teknis yang terjadi. Akan tetapi sampai dengan periode Triwulan IV 2020 telah dilakukan supervisi ke lapangan.

**Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	31	20 hari	22 hari	110.00

Berdasarkan data pada tabel 21 terlihat bahwa capaian hari operasi *speedboat* melampaui target pada Triwulan IV 2020. Realisasi ini sejalan dengan rencana operasi yang telah disusun, sehingga diharapkan pencapaian kinerja pada tahun 2020 dapat berjalan sesuai rencana. Rekapitulasi laporan yang masuk ke Direktorat POA Cq. Subdit Operasi Armada, diperoleh data realisasi rata-rata hari operasi Speedboat Pengawas periode Triwulan IV 2020 sebanyak 22 hari dengan rata jam operasi per hari sebanyak 5,2 jam. Rata-rata tersebut diperoleh dari Satker UPT PSDKP dan DKP Provinsi. Dari operasi yang dilakukan selama Triwulan IV 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 20. Hasil Operasi Speedboat Periode Triwulan IV 2020**

	KII	KIA	JUMLAH
RIKSA	4950	0	4950
TANGKAP	6	0	6
SITA ALAT TANGKAP	87	0	87

**Tabel 21. Capaian hari operasi speedboat pengawas 2019-2020**

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	30	31	103.33

2020	20	22	110.00
------	----	----	--------

Capaian s/d Triwulan IV 2020

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 11 ini menggunakan anggaran operasional speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat sebesar Rp.194.400.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.186.960.893,- atau 96,17%.

## 12

### JUMLAH RATA-RATA HARI OPERASI PESAWAT PATROLI

Indikator Kinerja “Jumlah hari operasi pesawat patrol” bertujuan untuk mengukur realisasi hari operasi pengawasan SDKP yang dilakukan dari matra udara. Target hari operasi pesawat patroli udara untuk tahun 2020 sebesar 131 hari operasi. Pelaksanaan Operasi Matra Udara dilakukan secara terintegrasi dengan unsur Kapal Pengawas Perikanan, baik Kapal Pengawas Pusat maupun UPT PSDKP, serta kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan.

**Tabel 22.** Target dan realisasi IKU-12 periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Pesawat Patroli	65	123 hari	131 hari	106.50%

Hingga Triwulan IV 2020, capaian IKU “Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan IUU *fishing* dan merusak SDKP di WPPNRI” sebesar 131 hari dari target 123 Hari. Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui udara (*Airborne Surveillance*) s.d periode Triwulan IV 2020 telah dilaksanakan sebanyak 19 periode dan mencakup *coverage area* sejumlah 1337314 Nm<sup>2</sup>. Pelaksanaan Operasi Matra Udara dilakukan secara terintegrasi dengan unsur Kapal Pengawas Perikanan, baik Kapal Pengawas Pusat maupun UPT PSDKP.

Berdasarkan capaian sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa realisasi hari operasi telah berjalan sesuai dengan rincian target kinerja bahkan melampaui target. Rincian pelaksanaan hari operasi pesawat patroli ditabulasikan sebagai berikut:

**Tabel 23.** Rincian pelaksanaan operasi udara sd Desember 2020

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM <sup>2</sup> )	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I	1 dan 7-9 Januari 2020	4	Natuna	WPPNRI 711	46.732,8	KP ORCA 01, KP ORCA 02, KP HMT 02	Pemantauan aktivitas KIA asal Vietnam
II-A	10 Februari	1	Jakarta	WPPNRI	3.523,2	-	Operasi

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM <sup>2</sup> )	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
	2020			712			Mandiri
II	12 – 28 Februari 2020	13	Manado dan Ternate	WPPNRI 716, 715, 713	158.592	KP Hiu 14	Pemantauan aktivitas Pumpboat KIA Filipina Penerusan informasi ke KP terintegrasi .
III	16 – 26 Maret 2020	10	Merauke, Biak, Sorong	WPPNRI 716, 717, 718	128.795,2	KP Hiu 05, KP HIU 14	Pemantauan KKPNTWP Padaido, TN Cendrawasih, Waigeo; Pemantauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil PMA Pemantauan aktivitas KIA dan KII
IV	6 – 7 April 2020	2	Batam	WPPNRI 711	30.708,8	KP. Orca 02 KP. Orca 03	Penerusan informasi ke Kapal Pengawas Pemantauan terhadap KIA Vietnam
IV-A	13 – 25 April 2020	9	Batam II dan Medan	WPPNRI 711, 712, 571, 572	75.953,6	KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. HMT 02, KP. Hiu 08 KP. Hiu 12	Penerusan informasi ke Kapal Pengawas Pemantauan terhadap KIA di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara Pemantauan terhadap KII Mini Otter Trawl di Perairan Lampung Timur dan Tanjung

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM <sup>2</sup> )	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
							Balai Asahan
<b>IV-B</b>	22-23 April 2020 dan 28 - 30 April 2020	5	Batam III	WPPNRI 711	56.553,6	KP. ORCA 02	Dukungan Misi SAR dengan KP. ORCA 02 Pemantauan aktivitas KIA dan KII
<b>V</b>	7 - 19 Mei 2020	11	Manado II dan Ternate	WPPNRI 712, 715, 716, 714, 713	89.465,6	KP Orca 01, KP Orca 04, KP Hiu 15	Adhoc 1 KIA Philipina Pemantauan aktivitas kapal cantrang di Laut Jawa dan operasional FAD di di Teluk Tomini dan Laut Sulawesi
<b>VI</b>	8 - 12 Juni 2020 dan 15 - 18 Juni 2020	9	Manado III dan Batam III	WPPNRI 716, 711	118.201,6	KP Orca 02 KP Hiu 11	Pemantauan aktivitas KIA di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara
<b>VI-A</b>	22 Juni - 6 Juli 2020	10	Surabaya dan Nusa Tenggara	WPPNRI 573, 713	72.025,6	Satwas PSDKP Lombok dan Stasiun PSDKP Kupang	Pemantauan aktivitas KII Pemantauan operasional jaring penangkap benih lobster di perairan Lombok
<b>VII</b>	10 Juli dan 21 Juli 2020	2	Banyuwangi dan Pontianak	WPPNRI 712 dan 711	13.804,8	-	Operasi Mandiri
<b>IX</b>	2 September dan 7 - 28 September 2020	14	Natuna III dan Medan II	WPPNRI 712, 711, dan 571	82.688	KP ORCA 02, KP PAUS 01, KP HIU 12	Pemantauan aktivitas KIA Malaysia dan

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM <sup>2</sup> )	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
							Vietnam Adhoc 1 KIA Malaysia oleh KP Hiu 12
<b>IXA</b>	24 - 30 September 2020	6	Batam V	WPPNRI 711	79.278,4	KP ORCA 02, KP PAUS 01, KP HIU 11	Pemantauan aktivitas KIA Vietnam Operasi SAR Kecelakaan Kapal Nelayan KM. Laura di Perairan Anambas
<b>X</b>	5 - 22 Oktober 2020	15	Manado IV	WPPNRI 716, 715, 714, 573, dan 713	180.475,2	Operasi Mandiri	Validasi Kepatuhan terhadap SPKP 3 Kapal Purse Seine dan 1 Kapal Longline
<b>XA</b>	19-20 dan 21-23 Oktober 2020	5	Jakarta dan Nusa Tenggara II	WPPNRI 573	79.299,2	Operasi Mandiri	Pemantauan KKPN Laut Sawu dari Operasional Fishing Agregate Devices (FAD)
<b>XI</b>	11 November 2020	1	Palembang	WPPNRI 712	7.696	Operasi Mandiri	Pemantauan Mini Otter Trawl di Perairan Lampung Timur
<b>XI-A</b>	5 dan 12-17 November 2020	7	Medan III dan Natuna IV	WPPNRI 571 dan 711	100.534,4	KP HMT 02	Pemantauan aktivitas KIA Malaysia dan Vietnam
<b>XI-B</b>	12 November 2020	1	Sorong	WPPNRI 717	24.624	Operasi Mandiri	Pemantauan aktivitas KII dan KIA di Samudera

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM <sup>2</sup> )	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
							Pasifik
<b>XII</b>	17 – 23 Desember 2020	5	Natuna V	WPPNRI 711	52588,32	Operasi Mandiri	Pemantauan aktivitas KIA di bagian Laut Utara Natuna Utara sebanyak 25 Kapal Validasi 3 Kapal Purse Seine dan 1 Kapal Cast Net untuk Kapal > 30GT
<b>Total Hari Operasi</b>		<b>131</b>	<b>Total Coverage Area (NM<sup>2</sup>)</b>		<b>1.337.314</b>		

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 12 ini menggunakan anggaran operasional kapal pengawas sebesar Rp.100.268.284.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.98.080.985.804,- atau 97,82%.

## 13

### PERSENTASE AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN YANG MEMPEROLEH PEMERIKSAAN KESEHATAN RUTIN TAHUNAN

Kesehatan merupakan kunci dari keberhasilan kegiatan pengawasan. Untuk memantau Kesehatan AKP setiap tahun dilakukan medical check up oleh rumah sakit Angkatan Laut/atau rumah sakit pemerintah lainnya yang ditunjuk/memiliki Kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan/medical check up, telah disusun IKU “Persentase AKP yang memperoleh pemeriksaan Kesehatan rutin tahunan” dengan tujuan untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemeriksaan kesehatan rutin tahunan.

**Tabel 24.** Rincian target dan realisasi IKU-13 periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Persentase AKP yang memperoleh pemeriksaan Kesehatan rutin tahunan	-	100	100	100.00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2020, sehingga tidak dapat dilakukan analisis dan komparasi data capaian dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Data capaian untuk periode Triwulan IV 2020 yaitu 100.00% yaitu sebanyak 160 awak kapal pengawas melakukan *medical check up*.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 13 ini sebesar Rp.8.716.587.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.8.463.302.813,- atau 97.09%.

## SASARAN KEGIATAN 5

### Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 15 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Nilai reformasi birokrasi (RB) area penguatan akuntabilitas lingkup Direktorat POA aspek pemenuhan, (2) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area peningkatan kualitas pelayanan public lingkup Direktorat POA aspek pemenuhan, (3) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan akuntabilitas lingkup Direktorat POA aspek reform, (4) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area peningkatan kualitas pelayanan public lingkup Direktorat POA aspek reform, (5) Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA, (6) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA, (7) Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA, (8) Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA, (9) Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA, (10) Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat POA, (11) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, (12) Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA, (13) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, (14) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA, (15) ndeks kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA.

## 14

### NILAI REFORMASI BIROKRASI (RB) AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS LINGKUP DIREKTORAT POA ASPEK PEMENUHAN

Pengukuran indikator kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Area Penguatan Akuntabilitas merupakan proses pemenuhan dokumen kelengkapan administratif Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB TA. 2019-2020. Sebagai upaya mencapai IK tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan utama berdasarkan rencana kerja yang telah disusun yakni pengumpulan data dukung yang tercantum pada komponen penilaian area Penguatan Akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri hasil capaian area penguatan akuntabilitas pada aspek pemenuhan sebesar 1,00 atau 181,82%. Capaian tersebut telah melebihi dari target minimum yang telah ditetapkan sebesar 0,55.

**Tabel 25. Rincian target dan realisasi IKU-14 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan akuntabilitas lingkup Direktorat POA aspek pemenuhan	-	0,55	1	181.82

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 14 ini menggunakan anggaran layanan perkantoran sebesar Rp.257.760.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.239.520.000,- atau 92.92%.

**15**

**NILAI REFORMASI BIROKRASI (RB) AREA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK LINGKUP DIREKTORAT POA ASPEK PEMENUHAN**

Pengukuran indikator kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan proses pemenuhan dokumen kelengkapan administratif Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB TA. 2019-2020. Sebagai upaya mencapai IK tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan utama berdasarkan rencana kerja yang telah disusun yakni pengumpulan data dukung yang tercantum pada komponen penilaian area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri hasil capaian area peningkatan kualitas pelayanan publik pada aspek pemenuhan sebesar 0,89 atau 161,82%. Capaian tersebut telah melebihi dari target minimum yang telah ditetapkan sebesar 0,55.

**Tabel 26. Rincian target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan kualitas pelayanan publik lingkup Direktorat POA aspek pemenuhan	-	0,55	0,89	161.82

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 15 ini menggunakan anggaran layanan perkantoran sebesar Rp.257.760.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.239.520.000,- atau 92.92%.

**16**

**NILAI REFORMASI BIROKRASI (RB) AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS LINGKUP DIREKTORAT POA ASPEK REFORM**

Pengukuran indikator kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Area Penguatan Akuntabilitas merupakan proses pemenuhan dokumen kelengkapan administratif Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB TA. 2019-2020. Sebagai upaya mencapai IK tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan utama berdasarkan

rencana kerja yang telah disusun yakni pengumpulan data dukung yang tercantum pada komponen penilaian area Penguatan Akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri hasil capaian area penguatan akuntabilitas pada aspek reform sebesar 0,86 atau 103,61%. Capaian tersebut telah melebihi dari target minimum yang telah ditetapkan sebesar 0,83.

**Tabel 27 . Rincian target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan akuntabilitas lingkup Direktorat POA aspek reform	-	0,83	0,86	103.61

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 16 ini menggunakan anggaran layanan perkantoran sebesar Rp.257.760.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.239.520.000,- atau 92.92%.

## 17

### NILAI REFORMASI BIROKRASI (RB) AREA PENGUATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK LINGKUP DIREKTORAT POA ASPEK REFORM

Pengukuran indikator kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan proses pemenuhan dokumen kelengkapan administratif Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB TA. 2019-2020. Sebagai upaya mencapai IK tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan utama berdasarkan rencana kerja yang telah disusun yakni pengumpulan data dukung yang tercantum pada komponen penilaian area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri hasil capaian area peningkatan kualitas pelayanan publik pada aspek reform sebesar 0,87 atau 104,82%. Capaian tersebut telah melebihi dari target minimum yang telah ditetapkan sebesar 0,83.

**Tabel 28 . Rincian target dan realisasi IKU-17 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Nilai Reformasi Birokrasi (RB) area penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Direktorat POA aspek reform	-	0,83	0,87	104.82

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 17 ini menggunakan anggaran layanan perkantoran sebesar Rp.257.760.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.239.520.000,- atau 92.92%.

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA tahun 2020 berjumlah 7 rancangan antara lain:

1. Petunjuk teknis Perawatan Tahunan (Docking) Kapal Pengawas Perikanan;
2. Petunjuk teknis Penyiapan Suku Cadang Kapal Pengawas Perikanan
3. Petunjuk teknis pembinaan pokmaswas;
4. Petunjuk teknis pendaftaran SKAT Online;
5. Petunjuk teknis sanksi administrasi
6. Petunjuk teknis Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP
7. Petunjuk teknis Pembinaan Awak Kapal Pengawas

Sampai dengan Triwulan IV 2020 capaian 100%, yaitu telah disusun 7 (tujuh) rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.

**Tabel 29.** Rincian target dan realisasi IKU-18 periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA tahun 2020	-	7	7	100.00

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 18 ini menggunakan anggaran layanan perkantoran sebesar Rp.257.760.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.239.520.000,- atau 92.92%.

Indikator kinerja IKU ini diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin Pegawai ASN yang dinilai melalui aplikasi SIMPEG KKP. Pencapaian IKU ini sangat ditentukan dengan kualifikasi Pendidikan pegawai serta keaktifan penginputan dan pembaruan data pegawai yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi

**Tabel 30.** Rincian target dan realisasi IKU-19 periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	-	72	68,85	95.63

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 19 ini menggunakan anggaran layanan perkantoran sebesar Rp.257.760.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.239.520.000,- atau 92.92%.

## 20

### TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA BIMTEK LINGKUP DIREKTORAT POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test). BIMTEK lingkup Direktorat POA tahun 2020 antara lain :

1. BIMTEK Aplikasi SIGOTIK, Sub Koordinator Kelompok Pengawasan dan Logistik
2. BIMTEK Manajemen Proyek, Koordinator Kelompok Infrastruktur ;
3. BIMTEK Perawatan Kapal Pengawas (ISM Code, Risk Assessment Training, SIRIKA, Pengkatan Kapal Pengawas, dan Pengelasan), Koordinator Kelompok Operasi Armada;
4. BIMTEK Aplikasi SKAT Online, Koordinator Kelompok Operasi Pusat Pengendalian.

**Tabel 31.** Target dan realisasi IKU-20 periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Tingkat pemahaman peserta BIMTEK lingkup Direktorat POA	-	75	85	113.33%

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2020 yang tidak ada di tahun sebelumnya/2019. Berdasarkan tabel 27 terlihat bahwa realisasi untuk periode Triwulan IV tahun 2020 sebesar 85 dari kegiatan BIMTEK SIGOTIK (Sistem Pengendalian Logistik).

## 21

### TINGKAT KELULUSAN PESERTA DIKLAT TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman peserta Diklat Teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Tingkat Kelulusan dari Peserta Diklat Teknis Lingkup Direktorat POA diperoleh dari perhitungan hasil kelulusan keseluruhan peserta yang mengikuti Diklat. Diklat yang diselenggarakan oleh Direktorat POA tahun 2020 antara lain : GMDSS, AFF, MFA, SCRB, SSO dan BST

Sampai dengan Triwulan IV 2020 indikator ini telah tercapai 100 dari target 80 yaitu sekitar 125,00%. Adapun telah dilaksanakan Diklat SSO sebanyak 25 orang, Diklat SCRB sebanyak 25 orang, Diklat AFF sebanyak 25 orang, Diklat MFA sebanyak 25 orang, Diklat GMDSS 22 orang dan Revalidasi BST 150 orang.

**Tabel 32.** Target dan realisasi IKU-21 periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Teknis Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	-	80	100	125.00

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 21 ini sebesar Rp.880.445.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.798.669.898,- atau 90.71%.

## 22

### NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator ini merupakan IKU baru di tahun 2020, nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Nilai rekonsiliasi merupakan verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja.

Pada bulan November 2020 telah dilakukan penilaian mandiri lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada memperoleh nilai sebesar 89,91 atau 99,90% dari target 90 dengan rincian : Kepatuhan sebesar 30%, kesesuaian sebesar 26,21, dan ketercapaian sebesar 33,70.

**Tabel 33.** Target dan realisasi IKU-22 periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	-	90	89,91	99.90

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan dari hasil rekonsiliasi pada Direktorat Pemantauan dan Operasi armada antara lain:

- a) Menonaktifkan IK yang tidak terpakai
- b) Menyesuaikan setiap perubahan data di seluruh dokumen perencanaan

## 23

### JUMLAH INOVASI YANG DIHASILKAN LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator ini tercapai dengan dihasilkannya inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada terselenggara pada periode Triwulan II yaitu dengan mengusulkan SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan secara Online)

**Tabel 34. Target dan realisasi IKU-23 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat POA	-	1	1	100.00

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 23 ini sebesar Rp.703.863.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.695.923.060,- atau 98.87%.

## 24

### INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SURAT KETERANGAN AKTIVASI TRANSMITTER

Indikator Kinerja Utama ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter). Untuk mengukur hal tersebut dilakukan dengan metode survey. Survey dilakukan selama 3 (tiga) kali yaitu pada semester I, kuartal II dan Kuartal III, adapun rincian nilai SKM adalah sebagai berikut:

1. Semester I = 87,88
2. Kuartal II = 88,05
3. Kuartal III = 89,27

**Tabel 35. Target dan realisasi IKU-24 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter	-	80	88,4	110.50

Hingga Triwulan IV 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah 88,4 dari target sebesar 80 sehingga capaiannya sebesar **110.50%**.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 24 ini sebesar Rp.165.955.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.146.321.432,- atau 88.17%.

## 25

### INOVASI GUGUS KERJA TRANSFORMASI YANG DIHASILKAN LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator kinerja ini dicapai dengan dihasilkannya inovasi unit kerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang bermanfaat bagi masyarakat, unit kerja maupun pegawainya dalam lingkup

program budaya kerja. Penerapan program budaya kerja terdiri dari 5 (lima) komponen yakni Profesional, Integritas, Loyalitas, inovAtif, dan sineRgi atau PILAR PSDKP.

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada menghasilkan inovasi budaya kerja E-SKAT yang merupakan implementasi dari inovasi pelayanan publik SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan secara Online).

**Tabel 36. Target dan realisasi IKU-25 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	-	1	1	100.00

Hingga Triwulan IV 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah 1 dari target sebesar 1 sehingga capaiannya sebesar **100.00%**

**26**

**PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT POA YANG TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN**

**Tabel 37. Target dan realisasi IKU-26 periode Triwulan IV 2020**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	60	75,92	126.53

Hingga Triwulan IV 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah 75,92 dari target sebesar 60 sehingga capaiannya sebesar **126.53%**

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU 26 ini menggunakan anggaran layanan perkantoran sebesar Rp.257.760.000,- sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.239.520.000,- atau 92.92%.

Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan (<https://kinerjakkp.bitrix24.com>).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Komponen penilaian pengukuran Manajemen Pengetahuan KKP antara lain: Keikutsertaan, Dokumen Kinerja, dan Keaktifan.

- a. Keikutsertaan  
Minimal unit eselon I sampai dengan eselon IV
- b. Dokumen  
Beberapa dokumen yang harus diupload sebagai dokumen pengetahuan antara lain : Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja dan Interim, Rencana Kerja RB, Rencana Aksi Kinerja.
- c. Keaktifan  
Keaktifan berupa senantiasa melakukan upload informasi/pengetahuan. Pimpinan unit eselon I sampai dengan staf wajib melakukan upload.

Informasi yang dishare pada aplikasi harus memenuhi 5w1H, yaitu: *Who (tentang siapa)*, *What (Apa yang terjadi)*, *Where (dimana peristiwa terjadi)*, *When (kapan peristiwa terjadi)*, *Why (mengapa hal itu terjadi)*, dan *How (bagaimana hal itu terjadi)*.

**Tabel 38.** Target dan realisasi IK-27 periode Triwulan IV 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW IV 2019	TARGET TW IV 2020	REALISASI TW IV 2020	%
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	91,67	82	90,37	110,21%

Berdasarkan tabel 30 terlihat target untuk Triwulan IV 2020 sebesar 82% dengan capaian sebesar 90,37%, hal ini mengindikasikan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 110,21%, namun lebih rendah dari periode yang sama tahun 2019. Hal tersebut juga dikarenakan naiknya jumlah target di Triwulan IV sebesar 82%. Tingginya capaian tersebut karena terjadi peningkatan keaktifan dan keikutsertaan lingkup Direktorat POA pada aplikasi



## REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS SUMBER DAYA

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan IV 2020 adalah sebesar **Rp188.974.856.860** atau **97.78%** dari pagu **Rp193,273,811,000**. Realisasi anggaran tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 lebih tinggi, realisasi Triwulan IV 2019 sebesar **Rp. 82,117,659,996**, hal ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan pengawasan yang tetap dilaksanakan ditengah Pandemi Covid 19.

**Tabel 40.** Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 31 Desember 2020

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa %
<b>PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA</b>	<b>193,273,811,000</b>	<b>188,974,856,860</b>	<b>97.78</b>	<b>4,298,954,140</b>	<b>2.22</b>
Operasional Kapal Pengawas	100,268,284,000	98,080,985,804	97.82	2,187,298,196	2.18
Operasional Pesawat Patroli	27,877,009,000	27,852,238,089	99.91	24,770,911	0.09
Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	8,716,587,000	8,463,302,813	97.09	253,284,187	2.91
Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang Siap Operasi	46,339,262,000	44,729,570,383	96.53	1,609,691,617	3.47
Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	5,584,159,000	5,487,338,245	98.27	96,820,755	1.73
Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	194,400,000	186,960,893	96.17	7,439,107	3.83
Kapal Pengawas yang Dibangun	2,466,106,000	2,395,265,023	97.13	70,840,977	2.87
Speedboat Pengawas yang dibangun	153,685,000	147,440,719	95.94	6,244,281	4.06
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam	897,799,000	875,669,426	97.54	22,129,574	2.46
Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	518,760,000	516,565,465	99.58	2,194,535	0.42
Layanan Perkantoran	257,760,000	239,520,000	92.92	18,240,000	7.08
<b>TOTAL</b>	<b>193,273,811,000</b>	<b>188,974,856,860</b>	<b>97.78</b>	<b>4,298,954,140</b>	<b>2.22</b>

**Tabel 41. Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA 2018-2020**

OUTPUT KEGIATAN	Anggaran 2018		Anggaran 2019		Anggaran 2020	
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Operasional Kapal Pengawas	167,033,431,000	111,340,712,829	76,049,753,000	73,604,092,876	100,268,284,000	98,080,985,804
Operasional Pesawat Patroli	22,500,000,000	21,451,370,262	14,448,000,000	14,083,758,779	27,877,009,000	27,852,238,089
Awak Kapal Pengawas Yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	1,000,000,000	749,919,566	13,074,947,000	11,984,713,317	8,716,587,000	8,463,302,813
Armada dan Sistem Siap Operasi	15,887,400,000	15,474,158,012	28,046,705,000	23,463,912,637	46,339,262,000	44,729,570,383
Perangkat Sistem Yang Operasional dan Terintegrasi	10,372,670,000	1,812,820,013	4,324,125,000	3,951,217,093	5,584,159,000	5,487,338,245
Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	-	-	-	-	194,400,000	186,960,893
Kapal Pengawas yang Dibangun	18,000,000,000	-	-	-	2,466,106,000	2,395,265,023
Speedboat Pengawas yang Dibangun	5,000,000,000	-	-	-	153,685,000	147,440,719
Unit Usaha yang Dipantau	500,000,000	332,817,503	-	-	-	-
POKMASWAS Yang Aktif Membantu Pengawasan SDKP	423,430,000	365,789,418	481,924,000	390,236,615	897,799,000	875,669,426
Bangunan/Pos Pengawasan Sdkp Yang Dibangun	350,000,000	173,106,462	400,000,000	377,669,118	518,760,000	516,565,465
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	60,000,000	57,370,000	50,000,000	49,830,000	-	-
Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,819,716,000	1,372,626,857	979,506,000	675,507,772	-	-
Layanan Perkantoran	2,906,465,000	2,065,593,436	2,944,274,000	2,290,294,081	257,760,000	239,520,000
<b>TOTAL</b>	<b>245,853,112,000</b>	<b>155,196,284,358</b>	<b>140,799,234,000</b>	<b>130,871,232,288</b>	<b>193,273,811,000</b>	<b>188,974,856,860</b>

### Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dengan memaksimalkan sumber anggaran yang ada untuk mendukung kinerja organisasi, namun pada triwulan II pencapaian kinerja sangat tergantung pada kondisi lapangan mengingat terjadi pandemi covid-19. Pada Triwulan II terdapat kebijakan pemerintah secara Nasional untuk penghematan untuk penanggulangan pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia, dimana Pagu semula Rp.270.143.837.000 menjadi Rp.195,110,111,000.

Optimalisasi yang telah dilakukan pada Triwulan IV 2020, telah optimalkan armada Kapal Pengawas Perikanan pusat yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal PSDKP (8 unit), untuk melaksanakan kegiatan pengawasan SDKP serta mengoptimalkan pelaksanaan operasi

pemantauan udara sehingga pendeteksian terhadap kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan secara illegal dapat dilakukan secara cepat dan dikirimkan kepada kapal pengawas perikanan untuk selanjutnya dilakukan *intercept*, Pola *intercept* ini sangat menghemat Bahan Bakar Minyak, karena Kapal Pengawas Perikanan memiliki target yang jelas pada saat operasi.

# BAB 4

---

## PENUTUP

Laporan Kinerja  
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada  
Direktorat Jenderal PSDKP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Triwulan IV 2020

## A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan IV 2020 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Triwulan IV 2020, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, Terhadap capaian IK tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU pada periode yang sama tahun sebelumnya dan target Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan,
2. Total IKU dan IK Direktorat POA tahun 2020 sebanyak 28 IKU, Target pencapaian untuk periode Triwulan IV 2020 sebanyak 28 IKU, Dari target 28 IKU/IK tersebut sebanyak 26 IKU/IK telah tercapai sesuai rencana dan 2 IKU yang belum mencapai sesuai target yaitu:
  - a. **Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Dit. POA”** dari target **75%** tidak tercapai dikarenakan pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan diagendakan pada Triwulan IV dan menunggu kondisi dan lingkungan sehat dan kondusif (bebas covid-19);
  - b. Nilai **kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA tidak tercapai**, dengan justifikasi disebabkan: Adanya revisi halaman III DIPA Satker Direktorat POA, kebijakan dalam pelayanan pada KPPN/pembatasan pengajuan SPM, sehingga performa penyelesaian tagihan terhambat, rendahnya penyerapan anggaran (pandemi covid-19), namun terdapat kebijakan Kementerian Keuangan dalam masa Pandemi- covid 19 Nilai IKPA tidak dapat dijadikan indikator pelaksanaan anggaran dan capaian nilai IKPA akan diukur pada akhir tahun.

## B. Rekomendasi

Sehubungan dengan beberapa kendala di atas, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
a) Memastikan pelaksanaan anggaran periode 2021 berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana dan rencana aksi pencapaian kinerja	a) Melakukan penyesuaian rencana penarikan dana sesuai dengan revisi anggaran, b) Melakukan rapat evaluasi bulanan terkait progress pelaksanaan anggaran